

BAB II PEMBANGUNAN NASIONAL (1984-1989)

Seperti disebutkan terdahulu, pembangunan nasional adalah usaha yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Rencana pembangunan nasional periode 1984-1989 itu, secara teoritis tertuang didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara hasil ketetapan MPR RI yang bernomor: II/MPR/1983. Sedang rencana operasionalnya, tertuang didalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (1984/85 - 1988/89), terdiri dari empat buku tebal, merupakan hasil Keputusan Presiden RI dengan nomor: 21 Tahun 1984. Rencana lima tahun ini, kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Keputusan Presiden juga.

Dewasa ini, rencana pembangunan yang ditempuh pemerintah dan bangsa Indonesia mengarah pada pembangunan masyarakat modern yang terbuka. Secara prinsipial ditinggalkan dogmatisme politik dan pembangunan dilakukan secara lebih realistis. Pada dasarnya, perhitungan ilmu pengetahuan dan prinsip ekonomis-teknis menjadi bahan dasar dari rencana pembangunan nasional. Dan sesuai dengan pendekatan ini, prinsip demokrasi diindoktrinasikan dalam kehidupan politik, pendidikan, dan ekonomi.¹⁴

Akibat pendekatan ini adalah: penyerdehanaan partai-partai; penyeragaman asas; pengendalian kebebasan kampus, media massa, dan karya tulis ilmiah; penangkalan pengaruh asing yang dianggap berbahaya; diperluasnya peranan militer; dan lain sebagainya yang dianggap mendukung proses indoktrinasi.

Titik sentral pembangunan nasional itu, menurut Dr.Pratiwi Sudarmono, adalah manusia Indonesia. Artinya, pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan

Dr. Pratiwi Sudarmono, adalah manusia Indonesia. Artinya, pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Dan juga bersifat memperbaiki keadaan dan lingkungan sebelumnya.¹⁵ Bangsa Indonesia akan bisa mewujudkan harapan ini, secara utuh dan menyeluruh, apabila seluruh potensi bangsa secara nasional dimanfaatkan dengan baik.¹⁶

Kebijaksanaan nasional suatu bangsa ditentukan oleh harapan dan cita-cita bangsa itu, persepsi kebutuhan rakyatnya, persepsi bangsa akan kondisi dalam negerinya, dan persepsi tentang letak bangsa itu dalam lingkungan dunia. Dilihat dari aspek-aspek ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional yang ditempuh Indonesia dilandasi tiga prinsip dasar yakni: mempertahankan stabilitas nasional, melanjutkan usaha pembangunan, dan mencapai keadilan yang lebih merata. Agaknya ketiga prinsip dasar tersebut, akan terus dipertahankan dimasa mendatang.¹⁷

Pelaksanaan pembangunan nasional harus berjalan seiringa dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sehingga terjalin hubungan yang erat antara pembangunan dan stabilitas nasional. Stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional, dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas nasional. ini berarti bahwa stabilitas nasional merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional.¹⁸

Dengan demikian, secara bertahap dapat dikejar cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur, merata, dan seimbang antara kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersana.

Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang: pola dasar pembangunan nasional, pola umum pembangunan jangka panjang, pola umum pembangunan lima tahun keempat, dan sekilas tentang rencana pembangunan lima tahun keempat. Uraian disini, terbatas pada hal-hal yang

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

A. Pola Dasar Pembangunan Nasional

1. Tujuan, Landasan, dan Asas-Asas

Tujuan pembangunan nasional -sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.II/-MPR/1983- merupakan bagian dari tujuan nasional yang termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...

Karena tujuan pembangunan nasional itu merupakan bagian dari tujuan nasional, maka dapat dikatakan tujuan pembangunan nasional adalah penjabaran dari tujuan nasional. Artinya tujuan nasional seperti tersebut diatas memiliki sifat yang umum, sesuai dengan sifat Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulis, sedangkan tujuan pembangunan nasional mempertegas dan memperjelas tujuan nasional dalam bentuk pernyataan yang lebih kongkrit dan terperinci.

Lebih tegas lagi dapat dilihat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.II/MPR/1983, yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah:

.....mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang -bagiannya dirinci dalam tujuan pembangunan nasional- kedalam langkah-langkah praktis, maka landasan yang digunakan adalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah halnya menurut Darji Darmodiharjo, selengkapnya dia menyatakan:

.....
Landasan ideal pembangunan nasional adalah Pancasila. Ini berarti bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dengan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasar atas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dengan mementingkan Persatuan Indonesia, dengan berpedoman kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945.²¹

Sedangkan asas-asas umum yang melandasi setiap usaha, kegiatan atau aktivitas dalamkiprah pembangunan nasional yang disebut sebagai asas-asas pembangunan nasional, selengkapnya menurut GBHN adalah sebagai berikut:

a. Asas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

b. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

c. Asas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

d. Asas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesiai dengan nilai darma-baktinya yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.

e. Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan peri kehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan Internasional.

f. Asas Kesadaran Hukum, ialah bahwa tiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada Hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

g. Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri, yaitu bahwa Pembangunan Nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.²²

2. Modal Dasar dan Faktor-Faktor Dominan

Prioritas pembangunan di Indonesia diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian guna memantapkan swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang produktif yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan.

Pembangunan Ekonomi adalah pola kegiatan yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk mencapai produk-produk ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas dari tingkat produksi sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang makin meningkat, karena tuntutan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nilai-nilai hidup yang selalu memperluas atau mengubah wawasan kebutuhan manusia.²³

Penekanan prioritas pembangunan pada sektor ekonomi mengakibatkan pengaruh yang luar biasa di bidang-bidang kehidupan lainnya. Pengaruh itu muncul bukan saja karena masyarakat didorong memperhatikan masalah kemakmuran atau memecahkan kesulitan-kesulitan ekonomi, tetapi masyarakat juga didorong untuk memperhatikan dan lantas melaksanakan penyesuaian-penyesuaian terhadap pertumbuhan produksi, distribusi barang, dan jasa. Hal ini menimbulkan akibat lanjut yang logis, yaitu dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam sistem kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai kemasyarakatan.²⁴

Keadaan tersebut tentu saja, sedikit banyak menggoncangkan beberapa modal dasar pembangunan nasional

yang merupakan potensi dasar yang dimiliki bangsa Indonesia yang semestinya tumbuh dan berkembang secara wajar dan dinamis. Namun karena pilihan prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia ini nampaknya tak dapat dihindarkan lagi, dengan harapan bila ekonomi dapat diatasi maka sektor-sektor lainnya dapat ditunjang dalam pengembangannya, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana mengatasi dampak negatif pengembangan dan pembangunan ekonomi tersebut, sehingga potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh bangsa tetap dapat tumbuh secara wajar dan dinamis menuju pada penyempurnaan-penyempurnaan diberbagai sektor.

Beberapa modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia bisa dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.
- b. Kedudukan Geografi Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan posisinya sebagai wilayah penghubung, serta terletak pada posisi antara dua benua dan dua samudra raya, dengan iklim tropika dan cuaca musimmusimnya memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi.
- c. Sumber-sumber Kekayaan Alam yang terdapat di darat dan di laut memberikan kehidupan Bangsa di segala bidang.
- d. Jumlah Penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.
- e. Modal Rohaniah dan Mental, yaitu Kepercayaan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa menuju cita-citanya.
- f. Modal Budaya, yakni budaya Bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah Bangsa.
- g. Petensi Efektif Bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai oleh Bangsa sepanjang sejarahnya, termasuk kekuatan sosial politik antara lain Partai Politik dan Golkar.

h. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari Rakyat dan bersama Rakyat menegakkan kemerdekaan Bangsa dan Negara.²⁵

Sedangkan lima faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam menggerakkan, mengembangkan, dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk meraih tujuan pembangunan nasional dengan landasan-landasan serta asas-asas seperti telah disebutkan, adalah sebagai berikut:

a. Faktor demografi dan sosial budaya. b. Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi. c. Faktor klimatologi. d. Faktor flora dan fauna. e. Faktor kemungkinan pengembangan.²⁶

3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Usaha-usaha pembangunan yang meliputi banyak bidang dan dilakukan di sebuah negara yang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa, budaya dan agama, dengan ciri-ciri tersendiri memerlukan suatu wawasan sebagai sarana pengikat untuk menyatukan semua suku bangsa, budaya dan agama dalam kesatuan yang harmonis. Wawasan yang dipakai adalah wawasan nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan. Dalam wawasan nusantara terkandung pengertian, bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan dalam bidang politik sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.²⁷

Menurut ketetapan MPR RI, wawasan nusantara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:

1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.

3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasip sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

5) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti:

1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

2) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:

1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Bagaimanapun juga, proses pembangunan sulit bisa melibatkan seluruh lapisan maupun kelompok dalam masyarakat secara sekaligus dan merata. Akibatnya, pengaruh pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup bagi kelompok satu atau lapisan yang satu, berbeda dengan yang diperoleh kelompok atau lapisan sosial yang lainnya. Ada yang lambat, ada yang lebih cepat, bahkan adapula yang belum merasakan perubahan yang menguntungkan, atau justru malah dirugikan oleh pembangunan.²⁹ Karena itu perlu adanya keserasian dalam berbagai tahap pembangunan, sehingga dampak-dampak negatif dapat dihindari dengan mudah serta berjalan mulus mengarah pada tujuan yang dicita-citakan. Hal ini tentunya memerlukan pemikiran dan perencanaan yang matang dan jitu.

Dalam melaksanakan pembangunan tentunya diperlukan syarat adanya ketahanan nasional, yakni ketangguhan dan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.³⁰

Di Indonesia untuk merealisasikan pertahanan keamanan dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhanhankamnas), suatu dewan yang membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan tertinggi di bidang pertahanan keamanan nasional. Dalam pelaksanaan fungsinya, dewan tersebut bertugas menyusun rencana kebijaksanaan Hankamnas dan bertugas menjamin terselenggaranya koordinasi secara efektif dan efisien, dan menjamin penyelenggaraannya yang berkaitan dengan seluruh sarana yang diperlukan dalam penentuan kebijaksanaan Hankamnas.³¹

Hal itu penting guna menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Sebab antara ketahanan nasional dan pembangunan nasional terdapat kaitan yang erat. "Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional".³²

B. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang diterapkan di Indonesia, yang meliputi jangka waktu antara 25 sampai dengan 30 tahun. Pola umum ini dibuat oleh wakil-wakil rakyat di MPR.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang didasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan Bangsa pada umumnya, serta sebagai usaha pengarahan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, dalam rangka menuju tercapainya cita-cita Nasional.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini, pada hakekatnya merupakan penyusunan rencana jangka panjang, yakni suatu perencanaan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.³³

Pembangunan jangka panjang itu, dilaksanakan secara bertahap dan sambung-menyambung dalam satu kesatuan yang serasi. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Sesuai dengan jangka waktunya, maka setiap tahap disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita).³⁴

Arah pembangunan jangka panjang adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang selaras dan berke-seimbangan dengan memperhatikan serta menjamin terwujudnya pembagian pendapatan yang merata sesuai dengan rasa keadilan dan sistem ekonomi yang demokratis. Pelaksanaan demokrasi ekonomi ini, pemerintah memberikan bimbingan untuk meningkatkan golongan ekonomi lemah. Pembinaan kecakapan dan ketrampilan dengan pemantapan teknologi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat mutlak diperlukan. Disamping itu, pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemampuan sendiri, sumber-sumber alam digunakan secara rasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, modal asing didudukkan

sebagai pelengkap, dan diarahkan menuju pertumbuhan ekonomi yang mempercepat pertumbuhan lapangan kerja; dibarengi pengendalian jumlah penduduk.³⁵

Pemerataan pembangunan tersebut akan tersendat, dan aktifitas masyarakat juga makin sulit diharapkan bila kondisi politik tetap diperketat. Dan Jika titik berat tetap diarahkan pada aspek pemerataan, maka dana pembangunan memang akan banyak terkuras hingga mengurangi laju pertumbuhan. Namun itu akan merangsang usaha ekonomi rakyat, menggalang partisipasi masyarakat dalam pemupukan modal dan pemecahan-pemecahan masalah di dalam negeri, hingga mengurangi beban ekonomi dan kendali negara.³⁶

Namun dalam pelaksanaan mungkin dijumpai lain, sebab keadaan masyarakat yang masih kurang cakap dan terampil secara ekonomis, serta kurangnya kesiapsiagaan dalam memanfaatkan tema-tema ekonomi. Karena itu bimbingan dan penyuluhan masih sangat perlu ditingkatkan.

Hingga disini persoalannya kembali pada sejauh mana pemerintah bersungguh-sungguh menempuh jalan yang ditunjuk oleh arah pembangunan jangka panjang tersebut.

Adapun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1 Bidang Ekonomi

Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan Rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita-repelita ialah:

- a. Repelita Pertama: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.
- b. Repelita kedua: meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- c. Repelita ketiga: meletakkan titik berat pada sektor

pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

d. Repelita keempat: meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

Dengan meningkatkan bidang industri dan pertanian secara bertahap seperti tersebut diatas, akan terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang, ialah struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat, setelah melampaui Pembangunan Lima Tahun yang Kelima atau yang Keenam yang akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijawab Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

3. Bidang politik

Dalam bidang politik dalam negeri dimantapkan kesadaran hidup politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional.

Dalam mencapai sasaran itu termasuk didalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan

kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawah, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

4. Bidang Pertahanan Keamanan

Sesuai Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional, maka diciptakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya dari setiap ancaman yang datang dari luar negeri serta dari dalam negeri, sehingga usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional benar-benar aman dan tertib.

Dalam pelaksanaan doktrin tersebut diatas, ABRI yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat untuk menegakkan dan mengisi kemerdekaan, adalah inti dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disamping selaku Kekuatan³⁷ Pertahanan Keamanan, juga merupakan kekuatan sosial.

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini menjadi dasar dan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun.

Periode pembangunan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah Pembangunan Lima Tahun Keempat. Karena itu, Pola Umumnya dibahas berikut.

C. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat

Sebagaimana disebutkan terdahulu, Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat disusun dimaksudkan sebagai upaya wakil rakyat dalam rangka mengarahkan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun

berlandaskan Pola Dasar Pembangunan Nasional. Dan penyusunan Pola Dasa Pembangunan Nasional berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Tap-Tap MPR yang masih berlaku. Semua tugas-tugas penyusunan ini, adalah tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang hasilnya dituangkan kedalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan legitimasinya menggunakan Tap MPR yang mempunyai kekuatan hukum diatas Undang-Undang. Keadaan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara".³⁸

1. Tujuan dan prioritas

Tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945 telah terserap dibenak sebagian besar tokoh masyarakat di Indonesia sehingga arus pemikiran secara nasional sebagian besar mengarah kesana.

Dalam rangka mengarah pada tujuan tersebut, para tokoh masyarakat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, merumuskannya serta menjabarkannya menjadi tujuan pembangunan nasional seperti tercantum di dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan itu, kemudian diperjelas lagi di dalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat yang merupakan pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, selengkapnya sebagai berikut:

Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pola Ummum Pembangunan Jangka Panjang, maka tujuan Pembangunan Lima Tahun Keempat ialah:

- Pertama: Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
- Kedua : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Memperhatikan tujuan pembangunan tersebut, nampaknya manusia Indonesia dilihat sebagai obyek pembangunan dan sekaligus subyek pembangunan. Dilihat sebagai obyek pembangunan berarti taraf hidup, yakni mutu hidup dan penghidupannya perlu ditingkatkan, disamping pelayanan pendidikan yang memadai untuk mencapai kesejahteraan. Dilihat sebagai subyek pembangunan berarti pelaksana pembangunan itu manusia Indonesia sendiri.

Sebagai subyek pembangunan, manusia dengan bakatnya dan kemampuan yang dimiliki, dengan keahlian, ketrampilan serta sikap-sikap hidup yang positif ia harus sanggup berperan serta dalam pelbagai bidang pembangunan nasional atas cara yang lebih kreatif, dinamis, dan berdaya guna.⁴⁰

Peranserta tersebut tentunya dilakukan dengan bijaksana agar tidak salah arah, salah tempat, atau salah langkah yang tak diharapkan. Lebih tepat lagi kalau peran serta itu dapat menyentuh hal-hal yang menjadi titik berat dan prioritas pembangunan sehingga memiliki dampak yang bersekala nasional.

Adapun Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keempat menurut Ketetapan MPR adalah:

.....dalam Pembangunan Lima Tahun Keempat prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Pelita-pelita selanjutnya.

Sejalan dengan prioritas pada bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain, makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan bidang ekonomi.⁴¹

Melihat prioritas pembangunan pada Pelita IV ini, nampaknya Indonesia mempersiapkan landasan memasuki tahap tinggal landas. Dalam memasuki tahap ini, industri diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator yang dapat

menggiring seluruh sektor perekonomian menuju tingkat laju pertumbuhan yang lebih cepat.

Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh kemampuan industri Indonesia untuk memproduksi berbagai jenis produk-produk industri sandang dan pangan, industri logam dan kimia. Namun, ciri-ciri industri Indonesia adalah padat modal dan kecil sumbangannya dalam usaha menciptakan lapangan kerja.⁴² Akibat lanjut padat modal adalah akumulasi modal yang tidak seimbang, dan berikutnya pemerataan hasil pembangunan menjadi terancam.

Karena itu setiap kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan hendaknya berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yakni: pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.⁴³

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut satu sama lain saling kait-mengait, karena itu perlu dijaga dan dikembangkan terus secara serasi agar satu sama lain tetap saling memperkuat dalam jalinan yang seimbang.

2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Umum

Dalam Pelita Keempat, yang meliputi jangka waktu 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989, berusaha melanjutkan arah dan kebijaksanaan yang ditempuh selama Pelita Ketiga. Dalam hal ini, persoalan pokok adalah memelihara dan mengembangkan stabilitas Nasional, baik stabilitas di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan menuju kesejahteraan sosial yang merata dan adil bagi seluruh rakyat.⁴⁴

Tekanan pada unsur stabilitas ini masih dianggap penting, karena setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial masih bergantung pada suatu lingkungan yang mampu mengendalikan ketidakpastian dan menjamin terselenggaranya perencanaan secara relatif aman. Pemeliharaan stabilitas

adalah suatu hal yang diperlukan, tetapi ia hanya menempati urutan kedua setelah penyelesaian masalah-masalah yang timbul. Dengan demikian, pembangunan menuntut pandangan yang lebih luas dan positif terutama mengenai tindakan dan pelaksanaan.⁴⁵

Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik, diusahakan kokohnya kesatuan bangsa, kokohnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan UUD 1945, dan pengamalan Pancasila dengan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dan dalam rangka Pengamalan Pancasila ini, Golongan Karya dan kekuatan sosial politik lainnya harus hanya berasaskan Pancasila.⁴⁶

Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila dinyatakan:

Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.⁴⁷

Sebagai sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang fungsinya sebagai dasar filsafat negara dan sumber Tertib Hukum Indonesia, maka demokrasi Pancasila harus dibina dan ditegakkan oleh seluruh aparatur negara Republik Indonesia, khususnya oleh penguasa dan petugas penegak hukum dan petugas negara.⁴⁸

Akhirnya tugas membina dan menegakkan demokrasi Pancasila itu, menjadi tugas masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".⁴⁹

Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha memelihara keamanan, ketertiban umum, dan kepastian hukum dengan meningkatkan efektifitas sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagai upaya pembangunan bidang pertahanan keamanan. Dalam hal ini, kewaspadaan dan ketrampilan ABRI sebagai poros pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial, perlu makin ditingkatkan. Disamping itu, juga perlu ditingkatkan upaya pembinaan aparatur Pemerintah, aparatur penegak hukum, dan khususnya peningkatan pembinaan militer sebagai kekuatan pertahanan keamanan sekaligus sebagai kekuatan sosial.⁵⁰

Sehubungan dengan fungsi militer seperti disebut di atas, sudah umum diterima dalam setiap sistem sosial, bahwa militer haruslah menciptakan dirinya sebagai kekuatan yang efektif ditengah-tengah masyarakat dan harus pula mampu merebut simpati masyarakat dengan mengakui mereka sebagai tentara terbaik. Untuk mencapai posisi tersebut, maka latihan-latihan militer dengan sendirinya diselaraskan dengan aturan-aturan dasar dari proses akulturasi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Di dalam tubuh militer, bagaimanapun, derajat akulturasi berjalan jauh lebih cepat dari pada apa yang dialami oleh masyarakat. Fakta ini menambah kecenderungan pada pihak perwira-perwira tinggi militer untuk memahami kesulita-kesulitan yang dialami oleh masyarakat sipil dalam proses adopsi ide-ide baru ketika modernisasi dan perubahan sosial sedang berlangsung.⁵¹ Akibat logis selanjutnya, militer akan dapat menunjukkan dirinya sebagai kelompok dinamisator dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi, disamping menjalin kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negeri yang kokoh.

Begitulah usaha politik dalam negeri Indonesia. Sedangkan untuk politik luar negeri, Indonesia tetap melaksa-

nakan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif secara konsekwen dan diabdikan untuk kepentingan pembangunan nasional. Sesuai dengan kemampuan, Indonesia terus meningkatkan peransertanya dalam mewujudkan Ketertiban Dunia dan Tata Ekonomi Dunia Baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara atau organisasi-organisasi Internasional yang sehaluan khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti ASEAN. Disamping itu, Indonesia secara terus menerus mengikuti perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, sehingga secara dini dapat ditanggulangi efek negatif yang ditimbulkan untuk mengamankan stabilitas dan pembangunan nasional.⁵²

Usaha pembangunan politik seperti dikemukakan di atas erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Walaupun diakui bahwa pembangunan di berbagai bidang, politik-ekonomi-sosial-budaya adalah saling berkaitan dan saling mendukung, namun bagaimanapun juga ternyata bahwa pembangunan ekonomi merupakan sektor yang mempunyai daya dongkrak terbesar.⁵³ Karena itu stabilitas di bidang ekonomi diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan selanjutnya.

Untuk memantapkan stabilitas ekonomi, maka kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik perlu dilanjutkan dan diadakan pembinaan yang serasi di berbagai sektor ekonomi yang mencakup: peningkatan produksi dan jasa, peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi kebijaksanaan perdagangan, peningkatan pengembangan pasar modal, penyempurnaan sistem perpajakan, peningkatan ekspor produksi dalam negeri, pengerahan dana tabungan masyarakat, penyempurnaan kebijaksanaan pinjaman luar negeri, penyempurnaan kebijaksanaan penanaman modal, penyempurnaan kebijaksanaan yang terpadu untuk memperluas lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah, peningkatan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha kecil, peningkatan pembinaan dunia usaha nasional,

penyempurnaan kebijaksanaan perkreditan, peningkatan pengembangan peranan koperasi, peningkatan pembangunan pertanian dan perkebunan serta perikanan, dan peningkatan pembangunan industri secara terpadu.⁵⁴

Antara berbagai sektor ekonomi ini, satu sama lain saling berkait. Kekuatan di satu sektor akan memperkuat sektor yang lain, begitu juga kelemahan di satu sektor akan malamahkan sektor yang lain. Karena itu, pengembangannya harus seimbang dan serempak mengarah pada tujuan pembangunan nasional.

Prinsip utama dalam ekonomi yang dikembangkan adalah prinsip sosio-demokrasi yang mendasari pemikiran ekonomi kekeluargaan. Dalam ekonomi kekeluargaan, persaingan bebas tidak ditampilkan, lebih-lebih yang dapat mengakibatkan keinginan yang saling menjatuhkan. Sebaliknya yang ditonjolkan adalah keinginan untuk bekerjasama; yang besar dan kuat membantu yang kecil dan lemah.⁵⁵

Ekonomi kekeluargaan ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan UUD 1945 yakni:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵⁶

Dan jika diperhatikan Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, juga melengkapi rumusan tersebut yakni:

- a. Sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa salira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- b. Menempatkan kepentingan Negara dan Bangsa diatas kepentingan pribadi.
- c. Dalam menggunakan hak-hak yang dimiliki, selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan ke-

pentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

d. Adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

e. Tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.⁵⁷

Dengan demikian pembangunan ekonomi untuk: perbaikan dalam kesejahteraan material, terutama untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah; pemberantasan kemiskinan massal yang berkaitan pula dengan masalah-masalah buta huruf, penyakit, dan kematian awal; perubahan dalam komposisi input dan output yang ada, dari kegiatan pertanian ke kegiatan industri; perbaikan sistem ekonomi untuk mencapai keadaan dimana kesempatan kerja tersedia, tidak saja bagi segolongan kecil minoritas, tapi yang terutama bagi angkatan kerja seluruhnya; peningkatan peranserta yang luas dari kelompok-kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perbaikan kesejahteraan mereka, sesuai dengan upaya yang dimaksud.⁵⁸

Selanjutnya, usaha-usaha pembangunan diarahkan untuk menciptakan manusia pembangunan yang dikaitkan dengan pembangunan daerah dan pedesaan, yang mencakup: usaha-usaha peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan pola hidup sederhana, meningkatkan tekad rakyat untuk memacu pembangunan, meningkatkan program keluarga berencana, meningkatkan transmigrasi beserta pembinaan dan fasilitasnya; peningkatan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pemukiman penduduk yang serasi dan seimbang dengan sumber alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, perluasan dan pembinaan sarana sosial budaya, dan peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya pelaksana pembangunan.⁵⁹

Pemerintah sebagai aparaturnya pembangunan, harus

memperhatikan lapisan masyarakat bawah untuk memperbaiki nasib 55 juta rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Upaya menjangkau dan meningkatkan taraf hidup lapisan masyarakat yang berpenghasilan paling rendah ini bukan saja merupakan tugas kemanusiaan, tapi juga merupakan tugas konstitusional yang tak dapat dibantah lagi.⁶⁰

Keberhasilan strategi pembangunan yang mencita-citakan pemerataan dan partisipasi masyarakat antara lain mensyaratkan pendekatan yang tidak paternalistik. Ini bisa dicapai melalui usaha terutama dalam mengubah orientasi dan sikap petugas, serta menciptakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih didesentralisasikan agar aspirasi dan potensi masyarakat dapat sepenuhnya tertampung dalam program-program yang dikembangkan dari bawah.⁶¹

Partisipasi masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah memang sulit dijangkau dan disentuh oleh modernisasi. Sebabnya, disamping faktor tradisi yang sudah melembaga kuat, juga pendidikan mereka biasanya rata-rata masih rendah.

Masyarakat lapisan bawah ini, seringkali tidak lantang dalam menyuarakan keluhannya dan aspirasinya, mereka juga berada jauh dari pusat kota atau pusat-pusat pemerintahan, tersebar jauh di pedalaman, daerah pedesaan ataupun pulau-pulau terpencil, sebagian terbesar tidak terorganisir, memiliki adat dan sistem nilai yang berbeda-beda, dan kepentingan mereka berbeda-beda. Posisi mereka serba lemah, maka guna mempertahankan eksistensi hidupnya mereka juga selalu bersikap peka terhadap setiap intervensi yang datang dari pihak-pihak di luar kelompok atau lingkungan yang mereka kenal. Karenanya untuk menjangkau mereka secara efektif, tidak mungkin diterapkan suatu kebijaksanaan umum yang seragam atau pendekatan yang disamaratakan begitu saja untuk semua kelompok di seluruh Indonesia, karena memang sebenarnya masing-masing kelompok

dan tiap-tiap daerah memerlukan perhatian khusus dan pendekatan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang masalah mereka yang serba unik dan berbeda-beda.⁶²

Dengan demikian, maka pembangunan untuk memperbaiki nasib masyarakat lapisan bawah tidak cukup hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar yang kompetitif, aparat birokrasi atau sekedar perencanaan dari atas saja, tapi pemecahannya harus dilakukan secara frontal dalam segala aspeknya yang saling kait-mengait. Karena itu pendekatan pembangunan yang partisipatif merupakan syarat utama dan kunci keberhasilan usaha pemenuhan kebutuhan pokok mereka, dan keberhasilan ini akan terus berkembang karena kemampuan swadaya yang mereka miliki telah ditumbuhkan secara wajar. Dalam kaitan inilah organisasi-organisasi kemasyarakatan -yaitu lembaga-lembaga diluar organ pemerintah dan perusahaan swasta- yang selama ini telah banyak bergerak dibidang usaha pembangunan sosial ekonomi dan pengembangan swadaya masyarakat, menjadi penting untuk diikutsertakan sebagai partner pemerintah dalam usaha bersama mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan kampung-kampung perkotaan.⁶³

Usaha-usaha pembangunan seperti telah dilukiskan tentunya membutuhkan dana pembangunan. Persoalan dana seringkali menjadi persoalan yang pelik, apalagi kalau penyusunan rencana itu tidak diserasikan dengan kemampuan dana yang dimiliki. Kerap kali ketika rencana disusun, kemampuan dana masih dalam perkiraan-perkiraan yang akan diterima pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan rencana itu bersifat elastis, artinya rencana akan dikurangi atau bahkan dirubah untuk disesuaikan dengan kemampuan dana yang secara realistis telah diterima.

Untuk pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keempat diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, sedangkan sumber-

sumber luar negeri merupakan sumber pelengkap.⁶⁴

Sumber dalam negeri dikelompokkan menjadi dua: penerimaan dari minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan dari luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan dari minyak bumi dan gas alam, dalam Pelita II, melampaui 50% dari penerimaan dalam negeri. Kemudian selama Pelita III sangat meningkat, sedikit melampaui dua pertiga sumber dalam negeri. Dan dalam Pelita IV, sekalipun masih cukup besar, hanya diperkirakan 60%. Sedangkan dana luar negeri, digunakan untuk membiayai program maupun proyek pembangunan.⁶⁵

3. Sasaran-sasaran Pembangunan

Sasaran Pelita IV ini, merupakan bagian dari sasaran Pembangunan Jangka Panjang yang dituangkan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Karena itu, suksesnya Pelita IV adalah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Jangka Panjang. Keberhasilan dalam mencapai sasaran Pelita IV adalah dalam rangka mencapai keberhasilan sasaran Pembangunan Jangka Panjang.

Secara garis besar, sasaran Pelita IV berusaha meningkatkan pembangunan di beberapa bidang yakni: ekonomi; agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya; politik, aparaturnya pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, dan hubungan luar negeri; dan pertahanan keamanan

a. Bidang ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi mencakup beberapa sektor ekonomi yakni: pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional dan usaha golongan ekonomi lemah, tenaga kerja, transmigrasi, sumber alam dan lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.⁶⁶ Sektor-sektor ekonomi ini, dalam Pelita IV, harus dibangun dan ditingkatkan secara terpadu dan berkese-

imbangan.

Infestasi segala sumber daya dan sumber tenaga, menurut profesor Sarbini Sumawinata, seharusnya dicurahkan untuk membangun rakyat ke arah kemampuan yang lebih baik dari pada sekarang. Inheren dalam persoalan ini ialah perubahan struktur ekonomi yang sangat dualistis menjadi struktur yang makin lama makin kurang, atau struktur ekonomi yang menyatu. Dengan demikian, maka dikurangilah dualisme antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, antara sektor yang menggunakan teknologi terbelakang dengan sektor yang memakai teknologi sangat modern, antara sektor yang tidak berorganisasi dengan sektor yang berorganisasi modern, antara sektor yang berkekuatan ekonomi sangat lemah dengan sektor yang berkekuatan ekonomi sangat kuat, antara sektor yang memproduksi hasil sedikit dengan sektor yang mampu memproduksi hasil sangat besar.⁶⁷

Hal ini, akan semakin mendukung pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja dikalangan rakyat banyak, ketika proses pembangunan ekonomi dilangsungkan dan digalakkan untuk memperluas dan meningkatkan berbagai sektor perekonomian yang berkesinambungan.

Perkembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan ekonomi yang demokratis, berjiwa kerakyatan, tak ada eksploitasi ekonomis, dan dibarengi dengan penghapusan sedikit demi sedikit model perekonomian yang paternalistik. Kenyataan paternalisme di bidang ekonomi nampak seperti yang dikatakan oleh Ichlasul Anal, dosen Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta, sebagaimana berikut:

Kelompok pedagang dan pengusaha di daerah pun hanya bisa berkembang bila mereka mempunyai patron pejabat daerah. Selama ini, proyek-proyek pembangunan tersebar ke segala pelosok daerah, sehingga menempatkan kepala daerah dalam posisi yang penting. Pejabat-pejabat daerahlah yang paling tahu bidang-bidang apa saja yang akan dikembangkan di daerahnya. Kelompok pedagang dan pengusaha di daerah harus berhubungan dengan mereka bila ingin mencari pesanan proyek. Karena itu, kelompok pengusaha tak segan-segan mencari patron pejabat

daerah.⁶⁸

Penghapusan paternalisme di bidang ekonomi ini, harus dilakukan berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai sektor yang ada. Sektor yang positif dibiarkan terus berkembang bahkan ditunjang, dan sektor yang negatif sedikit demi sedikit dengan penuh bijaksana dimasukkan keranjang sampah pembangunan. Dan harus tetap waspada, agar sistem ekonomi tidak mengarah pada liberalisme yang tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, arah yang ditempuh mungkin adalah pertengahan antara liberalisme dan sosialisme.

Akan tetapi, kewaspadaan harus lebih ditujukan pada golongan miskin atau berpenghasilan rendah. Untuk tahun 1975, penghasilan mereka rata-rata tiap bulan tiap keluarga berada diantara Rp 7000 dan Rp 20.000. Mereka ini sebagian besar terdiri dari: pegawai negeri golongan I dan II, pembantu rumah tangga, buruh, pengusaha kecil, pemungut kertas dan puntung rokok, tuna karya atau pengemis, dan masih terdapat lagi beberapa kemungkinan profesi pekerjaan lainnya yang berpendapatan rendah. Pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, pada umumnya, menuntut lebih banyak penggunaan tenaga kasar.⁶⁹

Dengan adanya kewaspadaan ini, dimaksudkan untuk menghapus kemiskinan, pengemis, dan profesi pekerjaan lain yang menjatuhkan martabat manusia Indonesia.

b. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sosial budaya

Usaha meningkatkan pembangunan bidang ini mencakup beberapa sektor yakni: agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pendidikan; kebudayaan; ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian; kesehatan; kependudukan dan keluarga berencana; perumahan dan pemukiman; kesejahteraan sosial; generasi muda; dan peranan wanita dalam pembangunan

bangsa.⁷⁰

Dalam pembinaan agama, usaha-usaha terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia ini. Hal ini, sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni:

....negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.⁷¹

Apalagi kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.⁷²

Selanjutnya, pembinaan agama terus ditingkatkan dikalangan masyarakat yang mencakup: para pejabat negara, pemimpin-pemimpin organisasi, para politisi, para ulama, para cendekiawan, para penulis dan pengarang, para pemimpin majalah atau koran, para wartawan, para guru, para mahasiswa dan pemimpin kaum remaja. Hal ini dimaksudkan, agar dampak negatif dari teknologi modern dapat dihindari. Dan arah yang dituju adalah masyarakat modern yang memegang teguh ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai moral.⁷³

Disamping itu, ditingkatkan juga kerukunan hidup antar umat beragama. Karena, kerukunan hidup antar umat beragama itu akan mempertebal kesatuan dan persatuan serta kesetiakawanan sosial untuk menghadapi tugas-tugas pembangunan yang semakin berat.⁷⁴

Dengan semakin semaraknya pengamalan agama dalam kehidupan sosial, keluarga, terutama pengamalan agama dalam kehidupan pribadi akan menambah rahmat Allah dalam kemajuan pembangunan yang dicapai.

Dalam rangka pengamalan agama ini, maka terus ditingkatkanlah usaha-usaha pelayanan dan kelancaran usaha penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan

kemampuan masyarakat.⁷⁵

Dan pertumbuhan masyarakat modern di Indonesia ini, akan melewati jalur sistem berpikir dimana yang menentukan kebenaran yang sebenarnya adalah agama. Dalam pengertian ini, agama menjadi tolok ukur bagi value system dan nilai-nilai moral.⁷⁶

Di bidang sosial budaya, terus diadakan pembinaan dan peningkatan dalam berbagai aspeknya sehingga bangsa Indonesia dapat mencapai ketangguhan sosial budaya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Ketangguhan yang dimiliki itu adalah ketangguhan yang menghargai nilai moral dan martabat manusia, sehingga tidak mengakibatkan penindasan terhadap bangsa-bangsa lain.

Pembinaan kebudayaan dikaitkan dengan pendidikan, sehingga dalam peningkatan keduanya terdapat keserasian dan keseimbangan.

Pengembangan pendidikan diharapkan menghasilkan lebih banyak orang-orang Indonesia yang berkemampuan lebih besar daripada kemampuan generasi-generasi orang Indonesia sebelum mereka.⁷⁷ Dipandang dari sudut lain, mutu pendidikan dan mutu lulusan pendidikan akan menentukan kebesaran nusa dan bangsa. Baik kebesaran di bidang spiritual maupun material, terutama sekali tergantung dari kepandaian manusia, bukan kekayaan alamnya.⁷⁸

Model pendidikan dasar harus diintegrasikan dengan pedesaan dalam rangka mencerdaskan golongan miskin yang menumpuk di pedesaan itu. Dalam hal ini, maka pendidikan harus menitikberatkan pada kemampuan baca tulis yang fungsional, disamping didasarkan atas suatu pandangan memberikan kesempatan pada mereka untuk mendapatkan ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerja. Dan kalau dilihat di Indonesia maka belum semua penduduk usia sekolah tertampung dalam sekolah sesuai dengan tingkatannya. Baru sekitar separo dari padanya dapat ditampung, dan usaha peningkatannya hampir tidak berarti sama sekali.⁷⁹

Masalah-masalah sosial lainnya yang perlu

diperhatikan dan ditingkatkan pembinaanya adalah masalah penduduk, kesehatan, perumahan, pemuda, peranan wanita, dan lain-lain.

Pertambahan penduduk yang pesat merupakan sebagian masalah-masalah yang mencekam Indonesia. Menurut sensus 1980 penduduk Indonesia berjumlah 147,5 juta jiwa dan diperkirakan 20 tahun lagi menjadi 215 juta yang menyebar di berbagai pulau secara tidak seimbang yakni: 62% di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 8,9% dari wilayah Indonesia; 48% di luar Pulau Jawa, Yang luasnya 93,1% dari wilayah Indonesia. Dalam rangka membendung dampak negatif pertumbuhan penduduk ini, apalagi kalau dikaitkan dengan lapangan pekerjaan, maka dapatlah dipahami kenapa intensifikasi dan ekstensifikasi program Keluarga Berencana dalam berbagai bentuk dan cara perlu dilakukan. Keluarga sehat sejahtera dengan 2 orang anak merupakan topik program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digerakkan secara nasional dan terarah.⁸⁰

Pembinaan perumahan harus segera ditingkatkan, sebab kondisi tunawisma di Indonesia ini sangat menyedihkan. Para tunawisma ini mudah ditemukan di lokasi-lokasi tertentu yang dapat dikategorikan daerah rawan atau berbahaya, misalnya: di bawah jembatan di kota-kota besar, di pinggir-pinggir rel kereta api⁸¹, dan tempat-tempat lain di sela-sela perkotaan dengan kondisi kesehatan dan kebersihan yang minim sekali. Mereka ini, oleh kebanyakan orang diberi predikat sebagai gelandangan.

Dalam masalah peranan wanita dalam pembangunan, persoalan yang mendesak adalah pemberantasan pelacuran, walaupun kemajuan yang dicapai oleh wanita Indonesia tampak begitu nyata.

Kemajuan wanita Indonesia ini nampak antara lain: banyak wanita menduduki posisi penting di segala bidang, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta; banyak sarjana wanita, wiraswastawati, karyawati, seniwati, ABRI penerbang wanita, antariksawati dan beberapa profesi lain yang juga

wanita; lebih 50% penduduk Indonesia adalah wanita yang merupakan potensi besar dalam menunjang pembangunan.⁸²

Namun yang perlu segera diatasi adalah peran ganda wanita Indonesia. Wanita harus tetap mendua membagi waktu, tenaga, pikiran, dan sikap. Kenyataannya walaupun wanita ikut serta di dalam sektor publik, masih punya kewajiban membereskan sektor domestik rumah tangga.⁸³

Dengan demikian, semakin tinggi profesi yang dicapai wanita semakin tinggi pula moral yang dituntut untuk menjalankan peran gandanya itu. Untuk merealisasikan orientasi keninggian moral ini, maka orientasi keagamaan dan peranan agama dalam kehidupan profesional harus semakin ditingkatkan. Dan dalam kaitan ini, juga patut dicantumkan petuah injiner Kartini yang antara lain berbunyi:

Mengapa norma sudah sangat lemah mengikat mereka (pen. kaum wanita) yang menyimpang dari kodrat? Aku senantiasa memohon kepada Gusti Allah, agar kaumku jangan keluar atau meninggalkan kodratnya. Perjuanganku bukan untuk membuat kaumku liar hidupnya, tapi yang kuinginkan meskipun kaumku telah mencapai kejayaan emansipasi, tetap dapat memelihara norma keluarga, menghormati norma sosial....

Jadilah benteng yang melindungi suamimu dari berbagai bujukan yang menyebabkannya menyelewengkan dana pembangunan. Sebab, bila sampai terjadi suamimu melakukan korupsi, tentu kamu dan anak-anakmu juga yang terkena akibatnya. Oleh karena itu, kamu harus selalu eling⁸⁴ agar hatimu tetap bersih dan daya tahanmu semakin kuat.

Dan untuk meningkatkan wawasan; maka penggalian ajaran-ajaran agama, pemerataan pengajarannya di tengah-tengah masyarakat khususnya kaum wanita profesi, perlu terus makin ditingkatkan.

Sedangkan aspek kepemudaan, terus ditingkatkan pembinaan pemuda di kota-kota maupun di desa-desa mengarah terwujudnya pemuda-pemuda yang tangguh yang mampu memikul beban pembangunan di hari depan, sesuai dengan bunyi sumpah pemuda 1928 yang terkenal itu.

Sedangkan persoalan pokok yang berkaitan dengan

pemuda adalah sejauh mana kaum muda Indonesia ikut serta dalam derap pembangunan bangsa yang tengah berjalan. Ukuran keikutsertaan itu dapat dilihat dari peran kaum muda dalam pengambilan keputusan politik pembangunan, dan partisipasi kaum muda itu sendiri dalam melaksanakan rencana-rencana atau kebijaksanaan pemerintah di bidang pembangunan nasional.⁸⁵

Dalam kaitan tersebut, maka peran serta kaum muda harus ditingkatkan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Sebab potensi pemuda adalah potensi yang enerjik yang akan sangat berguna bila dimanfaatkan.

c. Bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, dan hubungan luar negeri

Pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, juga dimantapkan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945. Pemantapan peranan organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dan pemantapan wadah-wadah penyalur aspirasi masyarakat pedesaan, juga dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan dikalangan masyarakat pedesaan.⁸⁶

Disamping itu, pembangunan politik pada hakekatnya adalah pembangunan budaya politik, dalam hal ini budaya politik Pancasila. Dari segi ini, pokok permasalahannya ialah bagaimana ide dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sungguh-sungguh terwujud dalam praktek kehidupan politik. Jadi masalah sebenarnya adalah masalah penanaman nilai yang lazimnya berjalan melalui proses Sosialisasi.⁸⁷

Selanjutnya, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pengabdian dan kesetiaan aparatur pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Langkah-langkah ini, dibarengi dengan langkah penyempurnaan, penertiban dan pengembalian kewibawaan aparatur pemerintah yang bersih tidak

korup.⁸⁸

Dalam pembangunan di bidang hukum diusahakan agar diluhurkannya kembali citra hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jelas, apa yang dibutuhkan adalah dimilikinya aparat penegak hukum khususnya manusia-manusia penegak hukum yang jujur, mampu dan mau mengemban tugas berat namun suci (*mission sacre*), manusia Hukum; jaksa, polisi, dan lain-lain penegak hukum yang berkemampuan dan berkemauan untuk mengamalkan P-4 di bidang hukum, manusia-manusia yang tangguh tak mudah menyerah untuk keadilan.⁸⁹

Dibidang penerangan dan media massa, diusahakan pembinaan di berbagai aspeknya yang mencakup: peranan media massa dalam pembangunan nasional; pengembangan pers yang bebas, sehat, dan bertanggung jawab; serta peningkatan sarana dan prasarana media massa. Disamping itu, penerangan dan media massa harus mampu memberikan informasi yang benar yang mampu memberikan motivasi dikalangan masyarakat luas sehingga gairah dan semangat membangun dapat tumbuh dengan subur.

Dibidang hubungan luar negeri, terus dilaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan untuk kepentingan nasional. Dan setiap gejolak politik di dunia terus diikuti untuk diambil hikmah dan manfaatnya, serta menghindarkan efek negatif terhadap pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

d. Bidang pertahanan keamanan

Pembangunan bidang pertahanan keamanan ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Disamping itu pembangunan bidang pertahanan keamanan juga ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka mendukung pelaksanaan, mengamankan hasil-hasil serta menjamin kelanjutan pembangunan nasional. Dalam hal ini pembangunan bidang pertahanan keamanan mencakup berbagai

aspek yakni: peningkatan pembangunan Hankam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, peningkatan pemeliharaan dan pengembangan kekuatan hankam, peningkatan upaya pertahanan dan upaya keamanan untuk menjamin tegaknya negara, peningkatan kemampuan kekuatan-kekuatan Hankam dan modernisasi penyelenggaraan Hankam, dan peningkatan kemampuan ABRI termasuk juga Polri.⁹⁰

Sedangkan pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Lima tahun Keempat ini dilakukan oleh Presiden selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mendengar saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Repelita Keempat yang merupakan Rencana Pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan diberbagai bidang dalam tahun 1984-1989. Dan dalam meningkatkan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan wajib meningkatkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹¹

D. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV), yang meliputi jangka waktu 1984/85 - 1988/89, merupakan rencana yang perumusannya didasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat; sesuai dengan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR.

Perincian secara luas dari Repelita IV itu, termaktub di dalam lampiran Keputusan Presiden RI Nomor: 21 tahun 1984. Dan lampiran tersebut terdiri dari empat volume buku tebal.

Volume pertama terdiri dari 10 bab yakni:

1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan .
2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan.
3. Keuangan Negara.
4. Kebijakan Moneter dan Perkreditan.
5. Neraca Pembayaran Internasional.

6. Perluasan Kesempatan Kerja.
7. Pengembangan Dunia Usaha.
8. Pengolahan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
9. Pertanian dan Pengairan.
10. Pangan dan Perbaikan Gizi.

Volume kedua terdiri dari 10 bab yakni:

1. Industri.
2. Pertambangan dan Energi.
3. Perhubungan dan Pariwisata.
4. Perdagangan.
5. Kooperasi.
6. Tenaga Kerja.
7. Transmigrasi.
8. Perumahan dan Pemukiman.
9. Agama.
10. Pendidikan dan Generasi Muda.

Volume ketiga juga terdiri dari 10 bab yakni:

1. Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Penelitian.
3. Kesehatan.
4. Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita.
5. Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Pembangunan Daerah.
7. Hukum.
8. Pertahanan Keamanan.
9. Penerangan, Pers, dan Komunikasi Sosial.
10. Aparatur Pemerintah.

Sedangkan isi dari volume keempat terdiri dari 27 bab yakni:

1. Daerah Istimewa Aceh.
2. Sumatera Utara.
3. Sumatera Barat.

4. Riau.
5. Jambi.
6. Sumatera Selatan.
7. Bengkulu.
8. Lampung.
9. DKI Jakarta.
10. Jawa Barat.
11. Jawa Tengah.
12. Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Jawa Timur.
14. Kalimantan Barat.
15. Kalimantan Tengah.
16. Kalimantan Selatan.
17. Kalimantan Timur.
18. Sulawesi Utara.
19. Sulawesi Tengah.
20. Sulawesi Tenggara.
21. Sulawesi Selatan.
22. Bali.
23. Nusa Tenggara Barat.
24. Nusa Tenggara Timur.
25. Maluku.
26. Irian Jaya.
27. Timor Timur.